



# Pemutakhiran

**PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019 TENTANG PERATURAN KEMENTERIAN  
DALAM NEGERI (PERMENDAGRI) TENTANG KLASIFIKASI,  
KODEFIKASI, DAN NOMENKLATUR PERENCANAAN PEMBANGUNAN  
DAN KEUANGAN DAERAH**

**KEPMENDAGRI NOMOR 050-3708 TAHUN 2020 TENTANG HASIL  
VERIFIKASI DAN VALIDASI PEMUTAKHIRAN KLASIFIKASI, KODEFIKASI  
DAN NOMENKLATUR PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN KEUANGAN  
DAERAH**



# LANDASAN KEBIJAKAN PEMERINTAHAN DAERAH berdasarkan Regulasi Kemendagri



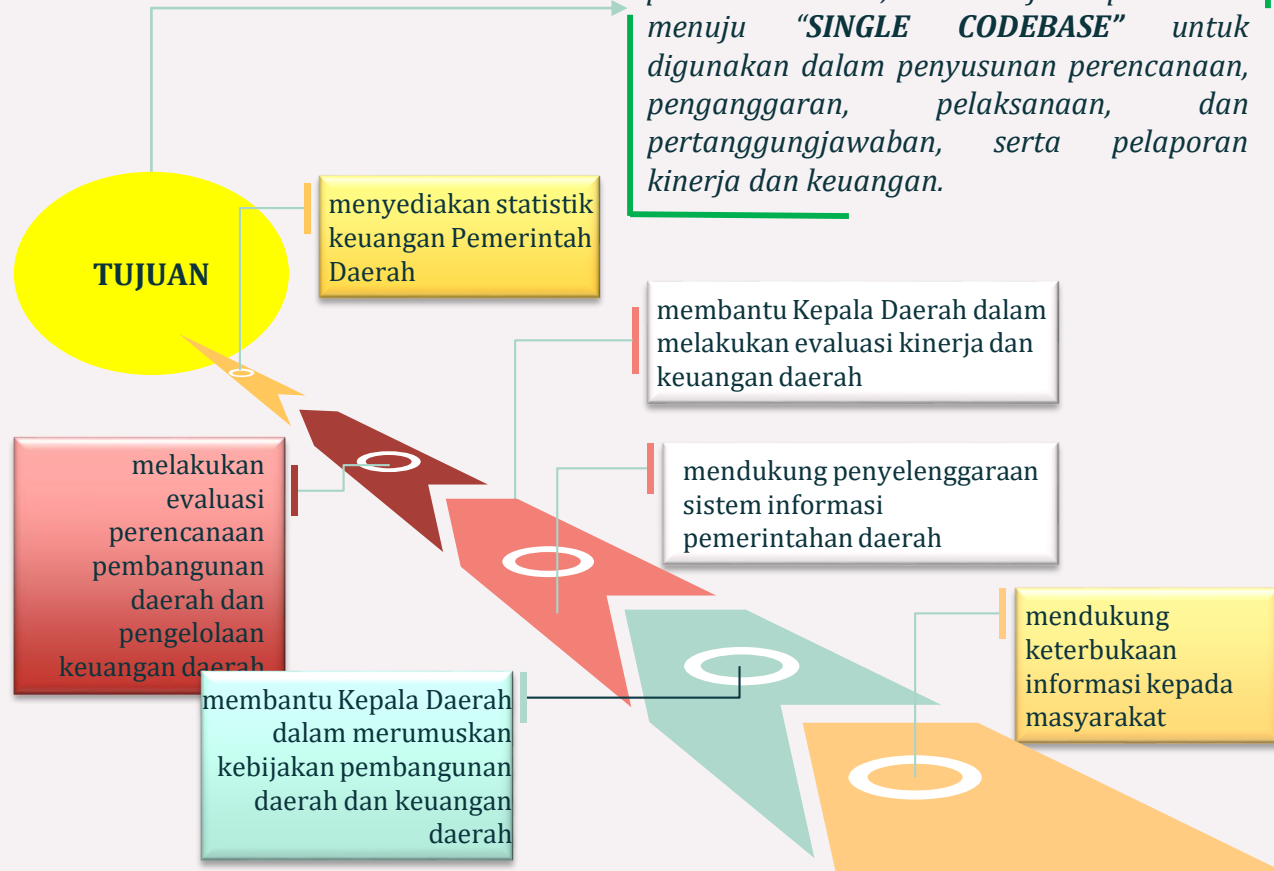
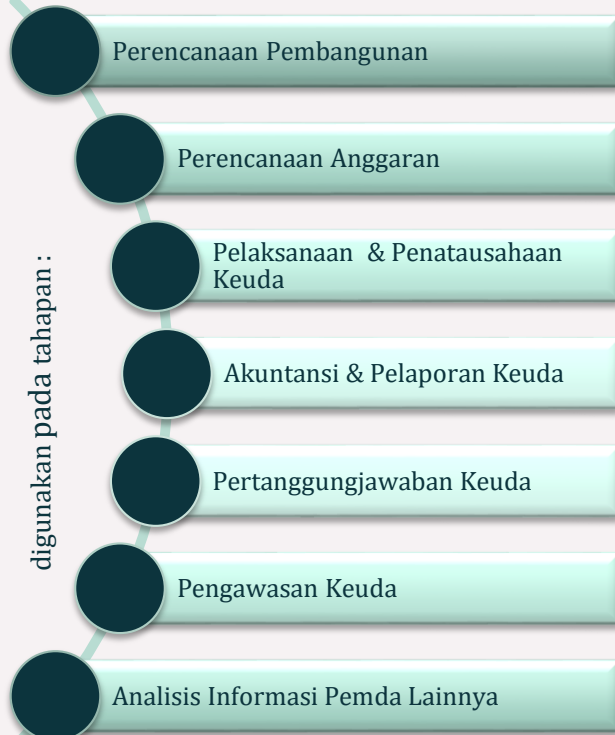
**KEMENTERIAN DALAM NEGERI** memiliki kewenangan melakukan sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah mulai dari penyelenggaraan urusan, pelaksana urusan, pengelolaan keuangan atas pelaksanaan urusan, pembinaan dan pengawasan hingga laporan dan evaluasi penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.



# TUJUAN DAN PENGGUNAAN

## Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019

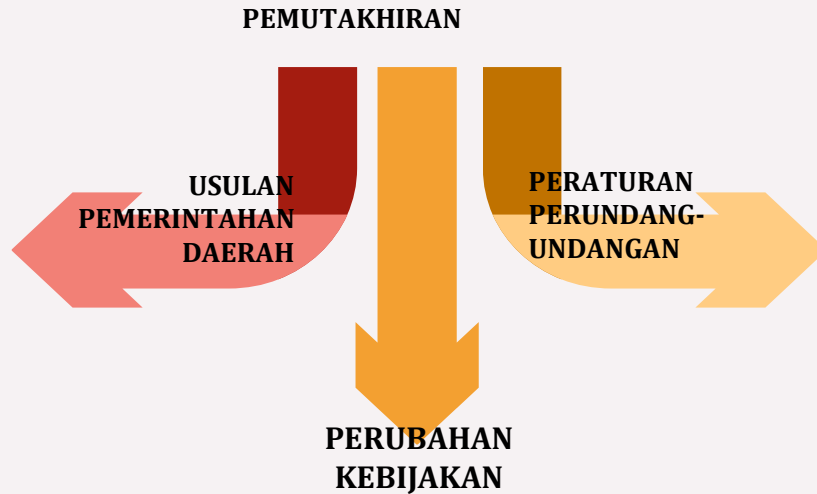
merupakan pedoman bagi pemerintah daerah dalam menyediakan dan menyajikan informasi secara berjenjang dan mandiri berupa penggolongan/pengelompokan, pemberian kode, dan daftar penamaan menuju **"SINGLE CODEBASE"** untuk digunakan dalam penyusunan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban, serta pelaporan kinerja dan keuangan.





# PEMUTAKHIRAN

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019



**KEPMENDAGRI NOMOR 050-3708 TAHUN 2020** TENTANG  
HASIL VERIFIKASI DAN VALIDASI PEMUTAKHIRAN  
KLASIFIKASI, KODEFIKASI DAN NOMENKLATUR  
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN KEUANGAN DAERAH

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dapat dilakukan **perubahan** sepanjang terjadi **pemutakhiran** yaitu **penambahan dan penyempurnaan atas pengelompokan, pengkodean, dan pemberian daftar penamaan** atas klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur atas Urusan, Bidang Urusan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, fungsi, organisasi, sumber pendanaan, wilayah administrasi pemerintahan, dan rekening.

- Dalam rangka mendukung pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Menteri membentuk Tim Pemutakhiran Klasifikasi dan Kodefikasi yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri.
- Tim terdiri dari unit kerja di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan melibatkan Kementerian terkait sesuai kebutuhan.



# Tahapan Pemetaan Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur



## HASIL PEMETAAN & USULAN

Rapat TAPD Tentang Hasil Pemetaan dan mengajukan usulan atas klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur apabila belum terakomodir dalam Permendagri No. 90 Tahun 2019

## PENYAMPAIAN HASIL PEMETAAN

Penyampaian Hasil Pemetaan dan Penyepakatan Berita Acara ke Kemendagri untuk selanjutnya dilaksanakan verifikasi oleh tim dan dilakukan pembahasan dengan TAPD (jika diperlukan)

## VERIFIKASI HASIL PEMETAAN

Kemendagri melakukan verifikasi atas hasil pemetaan dan usulan klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur dari pemerintah daerah, untuk selanjutnya diidentifikasi dan dibahas dalam rapat tim

## PENERBITAN PEMUTAKHIRAN

Kemendagri menerbitkan pemutakhiran klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri



## SOSIALISASI

Sosialisasi untuk menyamakan persepsi dalam penerapan Permendagri No. 90 Tahun 2019 yang dilaksanakan secara:

- terpusat oleh Kemendagri
- di daerah baik di provinsi maupun di kabupaten/Kota

## PEMETAAN TAPD

Pemetaan dilaksanakan oleh TAPD terlebih dahulu untuk menyamakan pola pemetaan yang akan dilaksanakan oleh setiap bidang terhadap mitranya

## PEMETAAN SKPD

Pemetaan SKPD melalui Desk Perangkat Daerah yang diasistensi langsung oleh setiap bidang di TAPD

## REVIEW HASIL PEMETAAN

Review dan Evaluasi Hasil pemetaan dari setiap Desk serta Penandatanganan Berita Acara Cascading oleh Perangkat Daerah



# Siklus Perencanaan Pembangunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah

## KEBUTUHAN INFORMASI

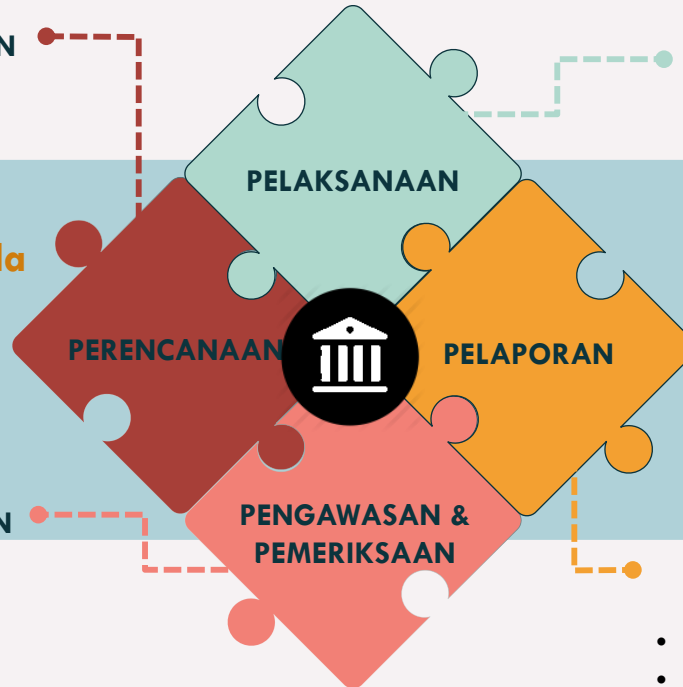
- URUSAN
- BIDANG URUSAN
- PROGRAM
- KEGIATAN
- SUB KEGIATAN
- ORGANISASI
- SUMBER DANA
- LOKASI
- AKUN
- KELOMPOK
- JENIS
- OBJEK
- RINCIAN OBJEK
- SUB RINCIAN OBJEK

## TAHAPAN PERENCANAAN

- RPJMD – Renstra
- RKPD – Renja
- KUA – PPAS
- **RKA-SKPD**
- **Rancangan Perda APBD**
- Rancangan Perkada Penjabaran APBD

## TAHAPAN PENGAWASAN & PEMERIKSAAN

- Evaluasi
- Reviu
- Audit
- Statistik



## TAHAPAN PELAKSANAAN

- DPA-SKPD
- Anggaran Kas & SPD
- Transaksi Penerimaan
- Transaksi Pengeluaran (SPP-SPM-SP2D-SPJ)
- Transaksi Akuntansi berbasis Akrual

## TAHAPAN PERTANGGUNGJAWABAN & PELAPORAN

- Laporan Keuangan SKPD & Pemda
- Laporan Kinerja

*“kebutuhan informasi harus tersaji secara utuh dan konsisten di setiap tahapan”*



# Menu Permendagri No. 90 Tahun 2019

## Urusan Pemerintah Daerah

Menyajikan Klasifikasi, Kodefikasi, & nomenklatur Urusan, Bidang Urusan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Provinsi dan Kab/Kota

### Fungsi

Menyajikan penyalarsan Fungsi dengan Sub Fungsi yang merupakan Bidang Urusan

### Organisasi

Menyajikan Klasifikasi, Kodefikasi, & nomenklatur perangkat daerah berdasarkan urusan

### Sumber Pendanaan

Menyajikan Klasifikasi, Kodefikasi, & nomenklatur sumber pendapatan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan program, kegiatan & sub kegiatan baik yang bersifat umum maupun khusus

### Administrasi Kewilayahan

Menyajikan Klasifikasi, Kodefikasi, & nomenklatur wilayah administrasi mulai dari provinsi, Kabupaten/Kota hingga kelurahan dan Desa

### Rekening

Menyajikan Klasifikasi, Kodefikasi, & nomenklatur atas rekening mulai dari Akun, Kelompok Jenis, Objek, Rincian Objek dan Sub Rincian Objek

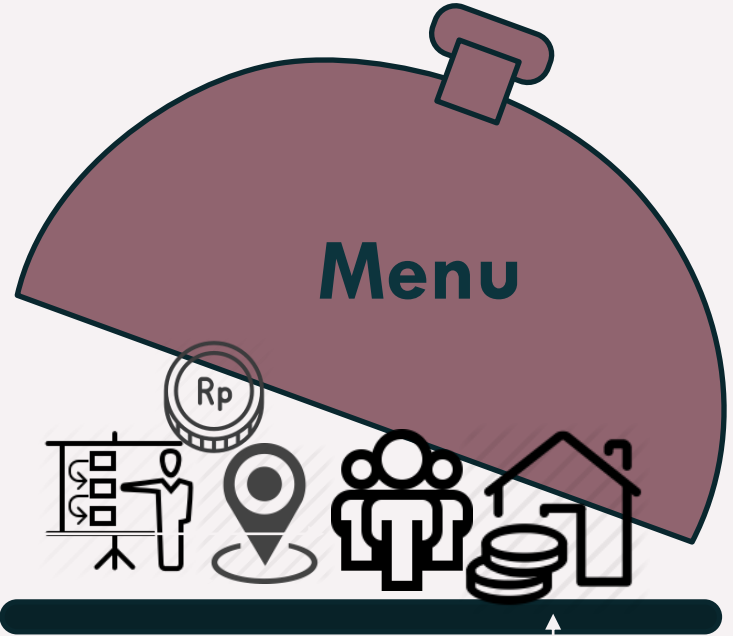
B-C

D

E-F

G

## A. Tata Cara Klasifikasi, Kodefikasi & Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah



H-I-  
J



# Memetakan Konsepsi Permendagri No. 90 Tahun 2019







# PRINSIP PENERAPAN PERMENDAGRI NO. 90 TAHUN 2019 Pada Tahun 2021





# TAHAPAN PEMETAAN



Kinerja Program



Kinerja Program



Kinerja Kegiatan

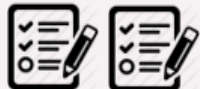


1 ke 1

Sub Kegiatan



Kinerja ditampung dalam sub kegiatan



> 1 ke 1



Kinerja ditampung dalam satu sub kegiatan



1 ke > 1



Kinerja dipecah ke dalam lebih dari satu sub kegiatan



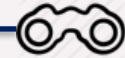
Apakah Kegiatan dalam Renstra/Renja SKPD itu adalah nama Belanja?



Apakah Kegiatan dalam Renstra/Renja SKPD itu bagian dari tahapan yang dipecah?



Apakah Kegiatan dalam Renstra/Renja SKPD Itu ternyata lintas urusan?



Apakah Kegiatan dalam Renstra/Renja SKPD Itu ternyata belum ada di Permendagri 90?



Diusulkan Pemutakhiran

Uji Nomenklatur, Aktivitas, Output



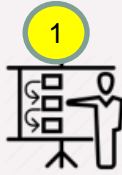
Belum temukan Sub Kegiatan



# Tindak Lanjut atas Hasil Pemetaan Klasifikasi, Kodefikasi, & nomenklatur

## JIKA

Terdapat Kegiatan dalam Renstra/Renja SKPD merupakan nama Belanja



Terdapat Kegiatan dalam Renstra/Renja SKPD merupakan tahapan yang dipecah bagian menjadi lebih dari satu kegiatan



Terdapat Kegiatan dalam Renstra/Renja SKPD ternyata bukan urusannya/lintas urusan



Terdapat Kegiatan dalam Renstra/Renja SKPD belum tercantum di Permendagri 90 tetapi memiliki landasan hukum



## MAKA

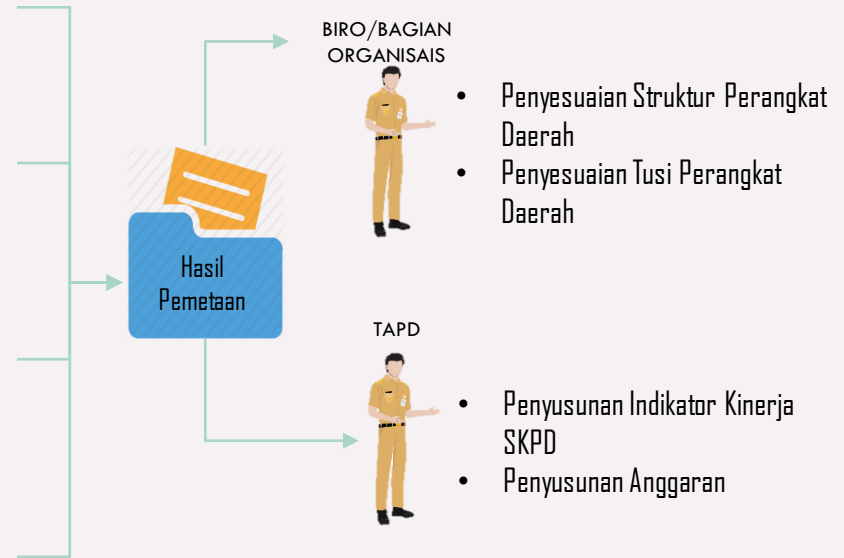
kegiatan tersebut akan ditempatkan pada sub kegiatan yang pencapaiannya membutuhkan belanja berkenaan

kegiatan tersebut akan ditempatkan pada satu sub kegiatan atau lebih yang pencapaiannya merupakan alur tahapan utuh

kegiatan tersebut akan ditempatkan pada satu sub kegiatan atau lebih dari urusan lain diluar urusan utamanya

Diusulkan untuk dimutakhirkan ke kemendagri dengan syarat telah melalui tahapan 1, 2 dan 3 di atas

## DASAR PERTIMBANGAN





# PRINSIP Klasifikasi, Kodefikasi, & nomenklatur Urusan, Bidang Urusan, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Ke dalam Organisasi Perangkat Daerah

## ORGANISASI PELAKSANA URUSAN/UNSUR

Dalam Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 Organisasi Perangkat Daerah dibentuk secara dinamis dan berjenjang untuk menterjemahkan secara teknis urusan pemerintah daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan



## PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN MENTERJEMAHKAN URUSAN/UNSUR

Dalam Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 Program/Kegiatan/Sub Kegiatan disusun berdasarkan urusan pemerintah daerah dan unsur dalam pemerintah daerah untuk menghasilkan keluaran berdasarkan indikator kinerja dalam pencapaian visi dan misi kepala daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

## PEMILIHAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN BERDASARKAN TUSI

Organisasi perangkat daerah yang dijabarkan kedalam tugas dan fungsinya, akan memilih dan melaksanakan serta mendanai program/kegiatan/sub kegiatan yang tersedia dalam Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 dalam rangka mencapai tujuan pemerintah daerah berdasarkan visi dan misi kepala daerah yang diterjemahkan secara teknis berdasarkan indikator kinerja secara berjenjang



# TAHAPAN PEMETAAN (MAPPING)

## Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2010



### Pemetaan Organisasi

menyajikan **alternatif-alternatif perumpunan** organisasi berdasarkan kondisi di pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota.

Klasifikasi dan kodefikasi organisasi **bersifat baku** yang disusun berdasarkan urusan pemerintahan dan unsur-unsur yang melaksanakan urusan pemerintahan.

Sedangkan **nomenklatur organisasi menyesuaikan perumpunan** sebagaimana telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.



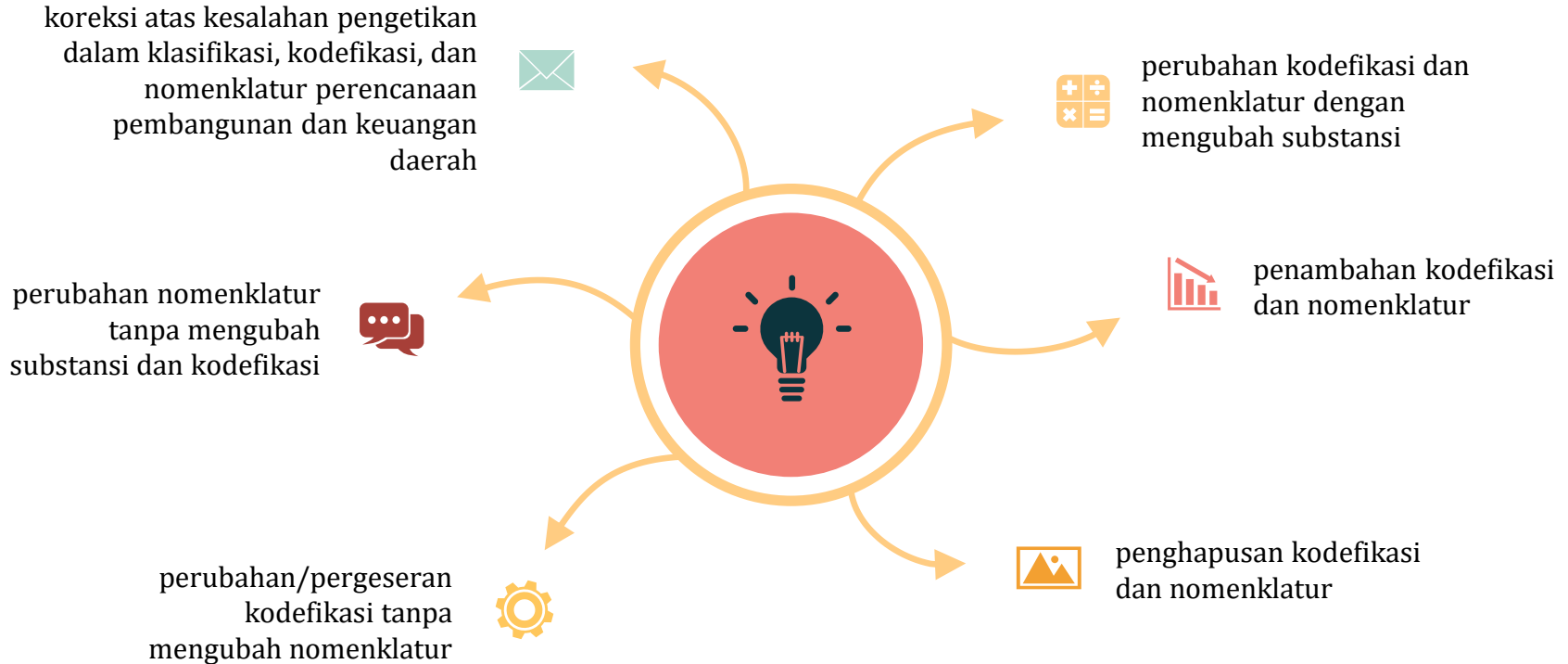


# PEMUTAKHIRAN

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019



## HASIL YANG DIMUTAKHIRKAN





# REVIEW

DOKUMEN PERENCANAAN

# KRONOLOGI

**PERMENDAGRI 90 TAHUN  
2019**

RKPD 2021

Tabel 4.1  
Tabel 4.2

**RANCANGAN AKHIR RENJA**

**KEPMEN 050-3708 TAHUN  
2020**

Kode baru  
Nomenklatur baru

**R-APBD**

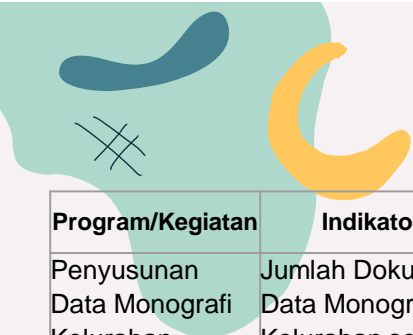





01.  
**Program**  
PEMERINTAHAN UMUM  
RPJMD 2018-2023




<b>Program/Kegiatan</b>	<b>Indikator</b>	<b>Sub Kegiatan</b>	<b>Indikator Sub Kegiatan</b>	<b>Sub Kegiatan Pemutakhiran</b>	<b>Kode Pemutakhiran</b>	<b>Kegiatan</b>
Penyusunan Data Monografi Kecamatan	Jumlah Dokumen Data Monografi Kecamatan	Perencanaan Kegiatan Pelayanan Kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah Dokumen Data Monografi Kecamatan	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	7.01.02.2.02.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan
Peningkatan Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu (PATEN) Kecamatan	Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan PATEN	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan PATEN	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	7.01.02.2.01.02	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan




Program/Kegiatan	Indikator	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Sub Kegiatan Pemutakhiran	Kode Pemutakhiran	Kegiatan
Penyusunan Data Monografi Kelurahan	Jumlah Dokumen Data Monografi Kelurahan sebagai arah pembangunan	Perencanaan Kegiatan Pelayanan Kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah Dokumen Data Monografi Kelurahan sebagai arah pembangunan	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	7.01.02.2.02.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan
Peningkatan Pelayanan Administrasi RT/RW di Kelurahan	Jumlah RT/RW terfasilitas	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah RT/RW terfasilitas	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	7.01.03.2.03.01	Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Di Tingkat Kecamatan

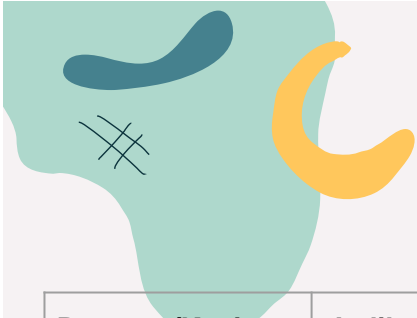




<b>Program/Kegiatan</b>	<b>Indikator</b>	<b>Sub Kegiatan</b>	<b>Indikator Sub Kegiatan</b>	<b>Sub Kegiatan Pemutakhiran</b>	<b>Kode Pemutakhiran</b>	<b>Kegiatan</b>
Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Kelurahan	Jumlah kegiatan mendukung peningkatan kualitas pelayanan administrasi kelurahan	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah kegiatan mendukung peningkatan kualitas pelayanan administrasi kelurahan	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	7.01.02.2.01.02	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan



<del>Program/Kegiatan</del>	Indikator	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Sub Kegiatan Pemutakhiran	Kode Pemutakhiran	Kegiatan
Fasilitasi Kegiatan Pemerintahan Umum	Jumlah Patroli	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Patroli	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	7.01.04.2.01.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum



<b>Program/Kegiatan</b>	<b>Indikator</b>	<b>Sub Kegiatan</b>	<b>Indikator Sub Kegiatan</b>	<b>Sub Kegiatan Pemutakhiran</b>	<b>Kode Pemutakhiran</b>	<b>Kegiatan</b>
Pembuatan / Pengembangan / Updating Sistem Informasi / Data Base Informasi Pembangunan	Jumlah Dokumen	Perencanaan Kegiatan Pelayanan Kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah Dokumen	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	7.01.02.2.02.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan





02.

Program

PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

RPJMD 2018-2023



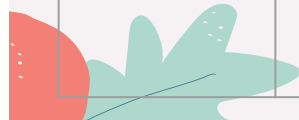
Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Sub Kegiatan Pemutakhiran	Kode Pemutakhiran	Kegiatan
Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan di Wilayah/ Tingkat Kecamatan	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang terfasilitasi		Pemberdayaan masyarakat di Kelurahan	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang terfasilitasi	Penyelenggaraa n Lembaga Kemasyarakatan	7.01.03.2.03.01	Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Di Tingkat Kecamatan
Pembinaan dan Pemberdayaan Perempuan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan	Jumlah kegiatan Pembinaan dan Pemberdayaan Perempuan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan		Pemberdayaan masyarakat di Kelurahan	Jumlah kegiatan Pembinaan dan Pemberdayaan Perempuan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan	Penyelenggaraa n Lembaga Kemasyarakatan	7.01.03.2.03.01	Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Di Tingkat Kecamatan







Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Sub Kegiatan Pemutakhiran	Kode Pemutakhiran	Kegiatan
Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Musrenbang		Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Musrenbang	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	7.01.03.2.02.01	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
Penyusunan Profil Kecamatan	Jumlah Dokumen Profil Kecamatan		Perencanaan Kegiatan Pelayanan Kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah Dokumen Profil Kecamatan	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	7.01.02.2.02.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan



Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Sub Kegiatan Pemutakhiran	Kode Pemutakhiran	Kegiatan
Pembinaan dan Fasilitasi Forum-Forum atau Koordinasi Tingkat Kecamatan	Jumlah kegiatan pembinaan dan fasilitasi forum atau koordinasi tingkat Kecamatan		Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah kegiatan pembinaan dan fasilitasi forum atau koordinasi tingkat Kecamatan	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	7.01.05.2.01.08	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah
Peningkatan Keamanan, Ketentraman Lingkungan Kecamatan	Jumlah monitoring peningkatan keamanan, ketentraman dan ketertiban lingkungan Kecamatan		Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	Jumlah monitoring peningkatan keamanan, ketentraman dan ketertiban lingkungan Kecamatan	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	7.01.04.2.01.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Sub Kegiatan Pemutakhiran	Kode Pemutakhiran	Kegiatan
Pembinaan dan Fasilitasi Forum-Forum atau Koordinasi Tingkat Kecamatan	Jumlah kegiatan pembinaan dan fasilitasi forum atau koordinasi tingkat Kecamatan		Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah kegiatan pembinaan dan fasilitasi forum atau koordinasi tingkat Kecamatan	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	7.01.05.2.01.08	Penyelenggaraa n Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah
Peningkatan Keamanan, Ketentraman Lingkungan Kecamatan	Jumlah monitoring peningkatan keamanan, ketentraman dan ketertiban lingkungan Kecamatan		Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	Jumlah monitoring peningkatan keamanan, ketentraman dan ketertiban lingkungan Kecamatan	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	7.01.04.2.01.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraa n Ketenteraman dan Ketertiban Umum

Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Sub Kegiatan Pemutakhiran	Kode Pemutakhiran	Kegiatan
Peningkatan Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Lingkungan Kelurahan	Jumlah kegiatan mendukung keamanan, ketentraman dan ketertiban lingkungan kelurahan		Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	Jumlah kegiatan mendukung keamanan, ketentraman dan ketertiban lingkungan kelurahan	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	7.01.04.2.01.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan di Wilayah / Tingkat Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan tingkat kelurahan yang terfasilitasi		Pemberdayaan masyarakat di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan tingkat kelurahan yang terfasilitasi	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	7.01.03.2.03.01	Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Di Tingkat Kecamatan



Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Sub Kegiatan Pemutakhiran	Kode Pemutakhiran	Kegiatan
Pembinaan dan Pemberdayaan Perempuan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pelatihan/Sosialisasi/Pertemuan PKK Kelurahan		Pemberdayaan masyarakat di Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pelatihan/Sosialisasi/Pertemuan PKK Kelurahan	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	7.01.03.2.03.01	Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Di Tingkat Kecamatan
Pembinaan dan fasilitasi kegiatan Sosial Kemasyarakatan di wilayah Kelurahan	Jumlah kegiatan sosial kemasyarakatan di Wilayah/ Tingkat Kelurahan yang terfasilitasi		Pemberdayaan masyarakat di Kelurahan	Jumlah kegiatan sosial kemasyarakatan di Wilayah/ Tingkat Kelurahan yang terfasilitasi	Pemberdayaan masyarakat di Kelurahan	7.01.03.2.03.01	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan





<b>Program/Kegiatan</b>	<b>Indikator</b>	<b>Satuan</b>	<b>Sub Kegiatan</b>	<b>Indikator Sub Kegiatan</b>	<b>Sub Kegiatan Pemutakhiran</b>	<b>Kode Pemutakhiran</b>	<b>Kegiatan</b>
Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Tingkat Kelurahan	Jumlah yang hadir dalam kegiatan Musrenbang Kelurahan		Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan	Jumlah yang hadir dalam kegiatan Musrenbang Kelurahan	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	7.01.03.2.02.01	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
Pembinaan dan peningkatan kemampuan dan ketrampilan masyarakat kelurahan	Jumlah kegiatan pembinaan dan peningkatan kemampuan dan ketrampilan masyarakat		Pemberdayaan masyarakat di Kelurahan	Jumlah kegiatan pembinaan dan peningkatan kemampuan dan ketrampilan masyarakat	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	7.01.03.2.02.03	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan





Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Sub Kegiatan Pemutakhiran	Kode Pemutakhiran	Kegiatan
Penyusunan Profil Kelurahan	Jumlah dokumen pemutakhiran Profil Kelurahan		Perencanaan Kegiatan Pelayanan Kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah dokumen pemutakhiran Profil Kelurahan	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	7.01.02.2.02.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan
Pembinaan Modin dan Perawat Jenazah	Jumlah Modin dan Perawat Jenazah terfasilitas		Pemberdayaan masyarakat di Kelurahan	Jumlah Modin dan Perawat Jenazah terfasilitas	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	7.01.03.2.02.03	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan





<b>Program/Kegiatan</b>	<b>Indikator</b>	<b>Satuan</b>	<b>Sub Kegiatan</b>	<b>Indikator Sub Kegiatan</b>	<b>Sub Kegiatan Pemutakhiran</b>	<b>Kode Pemutakhiran</b>	<b>Kegiatan</b>
Pembinaan Penjaga Tempat ibadah dan Penjaga Makam	Jumlah Penjaga Tempat ibadah dan Penjaga Makam terfasilitas		Pemberdayaan masyarakat di Kelurahan	Jumlah Penjaga Tempat ibadah dan Penjaga Makam terfasilitas	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	7.01.03.2.02.03	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
Pembinaan Guru Ngaji dan Guru Sekolah Minggu	Jumlah Guru Ngaji dan Guru Sekolah Minggu terfasilitas		Pemberdayaan masyarakat di Kelurahan	Jumlah Guru Ngaji dan Guru Sekolah Minggu terfasilitas	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	7.01.03.2.02.03	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan		Pemberdayaan masyarakat di Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	7.01.03.2.02.03	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan







# 03. Program

PENINGKATAN PRASARANA DAN SARANA PUBLIK  
RPJMD 2018-2023

Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Sub Kegiatan Pemutakhiran	Kode Pemutakhiran	Kegiatan
Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Prasarana dan Sarana di Wilayah Kecamatan	Jumlah Monev Pembangunan Prasarana dan Sarana di Wilayah Kecamatan		Evaluasi Kelurahan	Jumlah Monev Pembangunan Prasarana dan Sarana di Wilayah Kecamatan	Evaluasi Kelurahan	7.01.03.2.02.04	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
Penyusunan Rencana Pembangunan Prasarana dan Sarana Kewilayahan	Dokumen Data base kondisi Sarpras di wilayah Kecamatan (dan prioritas pelaksanaan pembangunan srapras)		Evaluasi Kelurahan	Dokumen Data base kondisi Sarpras di wilayah Kecamatan (dan prioritas pelaksanaan pembangunan srapras)	Evaluasi Kelurahan	7.01.03.2.02.04	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan

Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Sub Kegiatan Pemutakhiran	Kode Pemutakhiran	Kegiatan
Peningkatan Sarana dan Prasarana Lingkungan Kelurahan	Jumlah kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Lingkungan Kelurahan		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Lingkungan Kelurahan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	7.01.03.2.02.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (DAU TAMBAHAN)	Jumlah Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (DAU TAMBAHAN)	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	7.01.03.2.02.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan

## Target Selasa, 20 Oktober 2020

- Manajemen akun
- Pembuatan akun
- Pemutakhiran dan mengisi **target** tiap indikator

## Referensi/Alat Kerja

- Daftar Nama dan NIP
- Hasil Pemetaan (BA Pemetaan dan file excel program kesekretariatan)
- Draft RKA
- Perwal 24/2020 tentang RKPD
- Rancangan Akhir Renja
- Permendagri 90 Tahun 2019
- Kepmendagri 050-3708 Tahun 2020

**<https://malang.sipd.kemendagri.go.id/daerah>**

<https://malang.sipd.kemendagri.go.id/daerah>

